

Kekeringan di Bekasi Makin Meluas, Sudah Melanda 46 Desa di 10 Kecamatan

BEKASI (IM) - Bencana kekeringan di Kabupaten Bekasi makin meluas. Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mengirim bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan.

“Pemkab Bekasi melalui BPBD dan perangkat daerah yang menjadi LO (Liaison Officer) serta stakeholder lainnya, akan terus mendistribusikan bantuan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan,” kata Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan dalam keterangan tertulis, Rabu (20/9).

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi per Selasa, 19 September 2023 pukul 19.00, kekeringan yang sebelumnya melanda sembilan kecamatan dan 40 desa, kini bertambah menjadi 46 desa dari sepuluh kecamatan.

Adapun sepuluh kecamatan yang dilanda kekeringan, yakni Kecamatan Cibarusah, Serang Baru, Bojongsung, Cikarang Pusat, Pebayuran, Cabangbungin, Sukawangi, Babelan, Tarumajaya, dan Muaragembong. Jumlah warga terdampak kekeringan, yakni 49.892 KK atau sekitar 167.880 jiwa.

Jumlah lahan pertanian terdampak kekeringan kini seluas 21.250 hektar. Pemkab Bekasi bakal terus berupaya mengatasi kekering-

an lahan pertanian dengan membantu mengairi sawah para petani.

“Untuk lahan pertanian, kami sudah upayakan dengan menambah debit air, normalisasi sungai, mengangkang sampah dan membersihkan pintu-pintu air, menurunkan bantuan pompa air, membangun long storage dan standing crops pertanian,” ujar Dani.

Pemkab Bekasi memperpanjang masa status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan selama 14 hari ke depan. Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan sesuai memimpin rapat Koordinasi, evaluasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Aula BPBD Kabupaten Bekasi, Rabu (13/9) lalu.

“Kesimpulan dalam rapat ini adalah kami akan memperpanjang empat belas hari ke depan. Dengan berbagai konsekuensinya,” kata Dani dalam keterangan resmi tertulis.

Adapun perpanjangan status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan itu dilakukan karena wilayah, warga, dan lahan pertanian yang terdampak kekeringan masih bertambah.

Bantuan air yang dikirim kepada warga terdampak kekeringan sudah sebanyak 2.876.800.00 liter hingga Selasa kemarin. ● yan

DPDR DKI Minta PAM Jaya Siapkan Mitigasi Risiko Saat Ada Bencana

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPDR) DKI Jakarta meminta PAM Jaya untuk menyiapkan mitigasi risiko ketika terjadi kemarau berkepanjangan.

Hal itu buntut dari adanya krisis air bersih di RW 11 Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat yang membuat warga terdampak.

“PAM harus ada contingency plan jika kemarau terjadi berkepanjangan,” kata Anggota DPDR DKI Jakarta, William A Sarana melalui pesan singkat, Rabu (20/9).

Selain itu, ia juga meminta PAM Jaya untuk aktif menyisir lokasi mana saja yang terdampak akibat dampak penurunan kualitas air baku akibat kerusakan PAM ditambah kekeringan.

“PAM aktif menyisir RW RW yang mengalami kekeringan, lalu berikan tangki-tangki air dalam keadaan darurat,” imbuhnya.

Sementara, Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto melepas tanggungjawab krisis air bersih warga RW 11 tersebut kepada pihak terkait, dalam hal ini PAM Jaya.

“Memang dari PAM kan itu. Mungkin PAM nanti yang bisa jelasan,” katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (19/9).

Uus tak merinci apa langkah solutif untuk mengatasi krisis air bersih yang sudah dua minggu ini menghantui warga.

Ia hanya memastikan jika bantuan kepada warga yakni berupa pasokan air bersih terus dilakukan setiap harinya.

Hal itu, ungkapnya, se-

bagai langkah sementara bagi warga yang terdampak krisis air bersih.

“Tetapi yang jelas untuk kebutuhan saat ini alhamdulillah sudah kami bantu dengan PD PAM maupun Palyja,” tuturnya.

“Yang jelas itu kan Palyja dan PDAM. Tetapi untuk kebutuhan air bersih sudah kami tangani. Kami pakai tangki. Alhamdulillah sekarang sudah mulai terkondisi,” sambung Uus.

Lebih jauh, Uus menuturkan sejauh ini pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak krisis air bersih.

“Saya juga sudah koordinasi juga sama pak Arif dari PDAM termasuk Palyja untuk membantu mengoordinasikan kebutuhan warga. Untuk saat ini sudah terkondisi untuk yang kebutuhan warga,” tukasnya.

Hari-hari tak seperti biasanya dilewati ratusan warga di RW 11 Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Sudah beberapa hari ini, warga di RW 11 harus berjuang mendapatkan air bersih yang kini tengah menjadi masalah.

PAM yang mengalami kerusakan membuat sejumlah RT di RW 11 terdampak.

Akibatnya warga harus mengantri untuk mendapatkan air bersih. Diantaranya bahkan ada yang rela membeli air hanya untuk mandi.

Warga di lokasi, Sukinah mengatakan, tidak adanya air bersih sudah dirasakan hampir dua minggu. Namun ia mengaku tetap membayar tagihan air. ● yan

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



JELANG PESTAPORA 2023
Menpora Dito Ariotedjo (kanan) bersama Direktur Boss Creator Kiki Aulia Ucup (kiri) memberikan keterangan kepada media saat acara jelang Pestapora 2023 di Jakarta, Rabu (20/9). Acara festival musik tersebut akan digelar di Gembira Expo Kemayoran pada 22-24 September 2023.

Warga Tetap Dirikan Tenda Dekat JIS Sampai Bisa Tinggal di Kampung Susun Bayam

Meski sudah diberi peringatan oleh Kelurahan Papanggo untuk membongkar tenda demi berlangsungnya Piala Dunia U-17 pada November 2023, warga akan tetap tinggal di sana. Namun, mereka akan bergeser ke titik lain yang tidak mengganggu pembangunan trotoar di sana.

JAKARTA (IM) - Warga Kampung Bayam akan tetap bertahan di tenda dekat Jakarta International Stadium (JIS) sampai mendapatkan hunian di Kampung Susun Bayam (KSB), Jakarta Utara.

Meski sudah diberi peringatan oleh Kelurahan Papanggo untuk membongkar tenda demi berlangsungnya Piala Dunia U-17 pada November 2023, warga akan tetap tinggal di sana. Namun, mereka akan bergeser ke titik lain yang tidak mengganggu pembangunan trotoar di sana.

“Kalau memang awalnya buat apartemen, tidak buat warga Kampung Bayam, ya enggak usah pakai verifikasi, enggak usah pakai SK Gubernur, enggak usah dikocok (hunian),” kata Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Minawati, Rabu (20/9).

“Mereka juga enggak akan menuntut itu. Kami akan pindah masing-masing. Tapi, karena memang memang dari awalnya sudah dijanjikan, jadi mereka sampai titik darah

penghabisan, mereka pengin haknya mereka dapat,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan warga Kampung Bayam yang bertahan dengan mendirikan tenda bernama Agus Riyanto (42). Mewakili rekan seperjuangannya, Agus memastikan bahwa warga Kampung Bayam akan tetap mendirikan tenda meski harus berpindah-pindah titik sampai mendapatkan hunian KSB. “Betul sekali (bertahan mendirikan tenda sampai dapat hunian KSB). Kalau terjadi pembongkaran (tenda), mungkin bergeser,” tegas Agus.

Lebih lanjut, Minawati meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka ruang diskusi dengan warga Kampung Bayam. Palsinya, sepanjang kepemimpinan Heru Budi Hartono menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, belum pernah ada komunikasi

dua arah. “Belum, tidak ada. Semenjak Pak Anies lengser ya, kalau dulu pas sebelum Pak Anies lengser itu ada diskusi dua arah. Setelah dia, putus, enggak ada diskusi dua arah,” tutur Minawati.

“Adanya cuma satu arah. Mereka saja punya pendapat, punya pikiran, ya mereka doang, enggak tanya ke kami, ini maunya apa, ini maunya bagaimana. Itu enggak ada,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Lurah Papanggo, Tomi Haryono meminta warga Kampung Bayam untuk membongkar tenda secara mandiri karena di sana akan dibangun trotoar. Tomi tidak menampik bahwa pembangunan trotoar berkaitan dengan perhelatan Piala Dunia U-17 pada November 2023, mengingat JIS merupakan salah satu lokasi pertandingan.

Dalam surat imbauan kepada warga Kampung Bayam, Tomi memperingatkan, jika warga tidak mengindahkan

imbauan pembongkaran mandiri, maka akan dilakukan penertiban terpadu oleh aparat. Tomi juga mengingatkan bahwa segala risiko dan kerugian akibat penertiban tenda oleh aparat menjadi tanggung jawab warga Kampung Bayam.

Sebagai informasi, warga Kampung Bayam tergusur dari kediaman mereka imbas pembebasan lahan proyek JIS. Warga sudah tinggal di tenda sejak November 2022. Mereka mengaku tidak sanggup membayar kontrapas dan menolak untuk pindah ke Rusunawa Nagrak.

Warga Kampung Bayam sejatinya merupakan penghuni Kampung Susun Bayam (KSB). Namun, KSB masih belum bisa dihuni hingga saat ini karena persoalan lahan. Lahan tempat berdirinya KSB merupakan aset Pemprov

DKI, sedangkan KSB dibangun oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). ● yan

Pungli di SMAN Depok, Dipaksa Beli Buku hingga Nonton Kegiatan

DEPOK (IM) - Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengungkapkan, ada berbagai macam bentuk praktik pungutan (liar) di sejumlah SMAN di Kota Depok.

Setidaknya, Hendrik mendapat laporan ada dua SMAN di Kota Depok yang diduga meminta pungli ke orangtua siswa.

Menurut Hendrik, praktik pungli di kedua SMAN itu berbeda. “Di salah satu SMAN, (siswa) dipaksa beli buku, untuk apa? Kemudian ada lagi dipaksa nonton kegiatan di mana itu, kalau tidak datang, nilainya enggak bagus. Ini kan enggak benar,” urainya melalui sambungan telepon, Rabu (20/9).

Kemudian, di SMAN lainnya, murid dipaksa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di luar sekolah alias jalan-jalan. Menurut Hendrik, pihak SMAN tersebut melakukan praktik pungli dengan dalih pungutan suka rela. Padahal, tidak semua orangtua siswa mampu ketika dimintai uang untuk membeli sebuah barang atau mengikuti sebuah kegiatan.

“Tidak semua orangtua siswa itu punya uang. Ini kan sekolah negeri, tidak boleh ada pungutan,” tegas Hendrik.

Menurut Hendrik, para orangtua siswa terpaksa mengikuti kegiatan atau membeli barang yang diminta. Sebab, para orangtua siswa khawatir nilai anaknya akan anjlok, jika tidak mengikuti kegiatan

atau membeli barang yang diminta. “Mau enggak mau, orangtua dan muridnya ada rasa khawatir kalau itu tidak dilakukan, sehingga dengan terpaksa mereka mengikuti itu,” tegas Hendrik. Ia berharap Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat selaku pihak yang berwenang atas SMAN di Kota Depok menyelidiki dugaan pungli tersebut.

Dalam kesempatan itu, Hendrik juga meminta Disdik Jawa Barat agar memecat pihak-pihak di SMAN di Kota Depok yang melakukan praktik pungli untuk dipecat. “Kami meminta dengan sangat (agar) Disdik Jawa Barat yang membawahi (SMAN di Kota Depok), tolong ini dicek, ambil tindakan,” tegasnya. ● yan

USAI IBU KOTA PINDAH Pembangunan Jakarta Bakal Dikoordinasikan Dewas Regional

JAKARTA (IM) - Pembangunan Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota bakal dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan (Dewas) Regional Jabodetabekpunjur. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono soal rencana pembentukan Dewas Regional Jabodetabekpunjur setelah Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur.

“Dewas akan mengkoordinasikan pembangunan antar wilayah dan antar sektor sesuai peraturan perundang-undangan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan di Jakarta,” ujar Joko dalam keterangannya, Rabu (20/9).

Lewat pembentukan Dewas Jabodetabekpunjur ini, Pemerintah DKI dengan Kabupaten/Kota penyangga bisa bekerja sama menyinkronkan pembangunan. “Kawasan regional terdiri dari Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang Kota, Tangerang kemudian Bogor dan Cianjur,” kata Joko.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah disebut akan membuat Dewas Regional usai Ibu Kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2024. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pasca Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan, hal itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

“Dalam RUU rencananya Dewas Regional Jabodetabekpunjur akan dipimpin oleh Wakil Presiden secara ex officio,” ujar Pantas dalam keterangannya, Rabu (20/9). Pembentukan Dewas Jabodetabekpunjur itu tertuang dalam RUU DKJ Pasal 44 Ayat 1 yang berbunyi: “Dalam

rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang Kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta dan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibentuk Dewan Kawasan”. Dalam pasal yang sama, juga diterangkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Dewas Regional diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Sebagai informasi, pemerintah berencana tetap menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah berstatus daerah khusus meskipun ibu kota Indonesia akan pindah ke Nusantara. Wacana ini diusung melalui pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal yang membahas RUU tersebut pada Selasa (12/9) kemarin.

Salah satu hasil dari rapat tersebut ialah mengganti status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diamanatkan perlunya mengganti UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Pemindahan Ibu Kota Negara, berdasarkan UU IKN mengubah status Jakarta yang semula ‘Daerah Khusus Ibukota’ diarahkan menjadi ‘Daerah Khusus Jakarta,’” ujar Sri Mulyani, melalui unggahan akun resmi Instagram-nya, dikutip Rabu (13/9). ● yan



KABEL UTILITAS MASIH SEMRAWUT

Petugas Indahome dikemacetan jalan menata kabel yang menjuntai semrawut di pertigaan jalan Ratna, Bekasi, Rabu (20/9). Kesemrawutan kabel utilitas yang terjadi di Jabotabek tersebut akibat tata kelola yang kurang baik sehingga dapat mengganggu dan menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan.

PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi bermaksud melakukan penawaran umum REKSA DANA PT SYAILENDRA CAPITAL (“REKSA DANA”) dengan rincian sebagai berikut:

1. REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 3 yang telah memperoleh surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-2631/PM.02/2023 tanggal 14 September 2023. Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 3 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada masa penawaran.

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA dapat diperoleh di Kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

SYAILENDRA reksa dana

Jakarta, 21 September 2023
Manajer Investasi
PT SYAILENDRA CAPITAL
District 8, Treasury Tower, 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

“INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENGEREMIKAN KINERJA MASA DATANG. PT SYAILENDRA CAPITAL TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN.”